

Daftar Pustaka/References

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Karantina Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487.
- Republik Indonesia, Peraturan Kementerian Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326.
- Republik Indonesia, Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta.

Buku :

- Indrati, Maria Farida S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius
- Koentjoro, Tjahjono. 2007. *Regulasi Kesehatan*, Yogyakarta: Andi Offset
- Nasution, Mirza. 2011. *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: PT. Sofmedia
- Putra, Fadillah. 2012. *Governance Intelligence & Quotient*, Malang: UB Press
- Sarman, MH. dan Prof. Muhammad Taufik Makarao, SH. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Karya Ilmiah:

- Bratakusumah, Deddy S. PhD. "Peran Gubernur Dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Daerah", Universitas Esa Unggul
- Fakhrazi, Muhammad Helmi. "Independensi Jabatan Ex-Officio Komisi Kepolisian Nasional dalam Kajian Sistem Ketatanegaraan", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1 2016, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran
- Situmeang, Tomson. "Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal To-ra*, Vol. 6, No. 2 Agustus 2020, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- Telaumbanua, Dalinama. "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia", *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 12 No. 1 Maret 2020, Sumatera Utara: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan
- Yunus, Nur Rohim dan Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar i*, Vol. 7, No. 3 (2020), Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia”, SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 3 (2020), Bogor : Universitas Ibn Khaldun

Sumber Lainnya:

- _____, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-minta-pergub-sanksi-psbb-menjadi-perda>, diakses pada tanggal 5 November 2020
- _____, <https://theconversation.com/pemerintah-pusat-dan-daerah-tidak-kompak-dalam-menangani-pandemi-akibatnya-penanganan-jadi-lambat-139038>, diakses pada tanggal 5 November 2020
- _____, <https://riwayat-file-covid-19-dki-jakarta-jakartagis.hub.arcgis.com/>, diakses pada tanggal 4 November 2020
- _____, <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada tanggal 4 November 2020
- _____, https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020
- _____, www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020
- _____, ”Lockdown Perspektif Otonomi Daerah”
<http://www.dakta.com/opini/23966/lockdown-perspektif-otonomi-daerah>